



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BENGGO TAHUN 2023



**RENCANA KERJA
KECAMATAN BENGO
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr,Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya juaah kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Bengo Tahun 2023, shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bengo ini adalah merupakan media Kecamatan Bengo dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian mengenai pelaksanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan di daerah Kecamatan Bengo yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan.

Disamping itu Renja ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisahkan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang di terima masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Bengo sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah Kabupaten Bone secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bengo sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya Renja ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bengo selama Tahun 2023, melalui Renja ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Demikian kiranya Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Bengo dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Terima kasih.

Wassalam

Matango, 29 Juli 2022

Kamat Bengo



A. RAHMATULLAH, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19790906 199912 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penyusunan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontocani Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bengo	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengo	23
2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bengo	28
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN	41
3.1 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bengo	43
3.3 3.3 Program Dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V PENUTUP	53
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja	53
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	53
5.3 Rencana Tindak Lanjut	55
LAMPIRAN 1	57

DAFTAR TABEL

Tabel I. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan
Dan Pencapaian Renstra Kecamatan S/D Tahun 2022 Provinsi
Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.....13

Tabel II. Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30.....25

Tabel III. T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengo Kabupaten
Bone Provinsi Sulawesi Selatan26

Tabel IV. T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal Awal RKPD Tahun 2023
Kecamatan Bengo.....32

Tabel V. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan
Tahun 2023 – Kecamatan Bengo Kab. Bone.....45

Tabel VI. T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya.....3

Gambar 2. Bagan Air tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD).....5



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

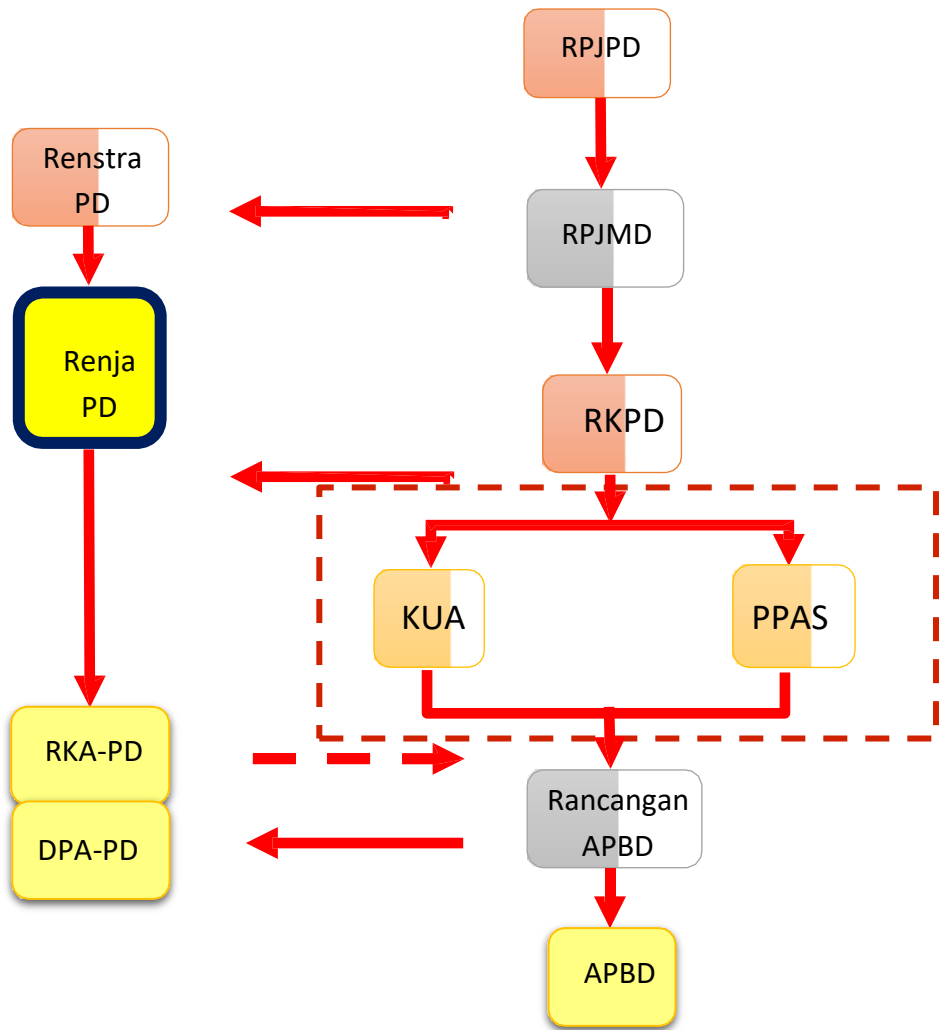
Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



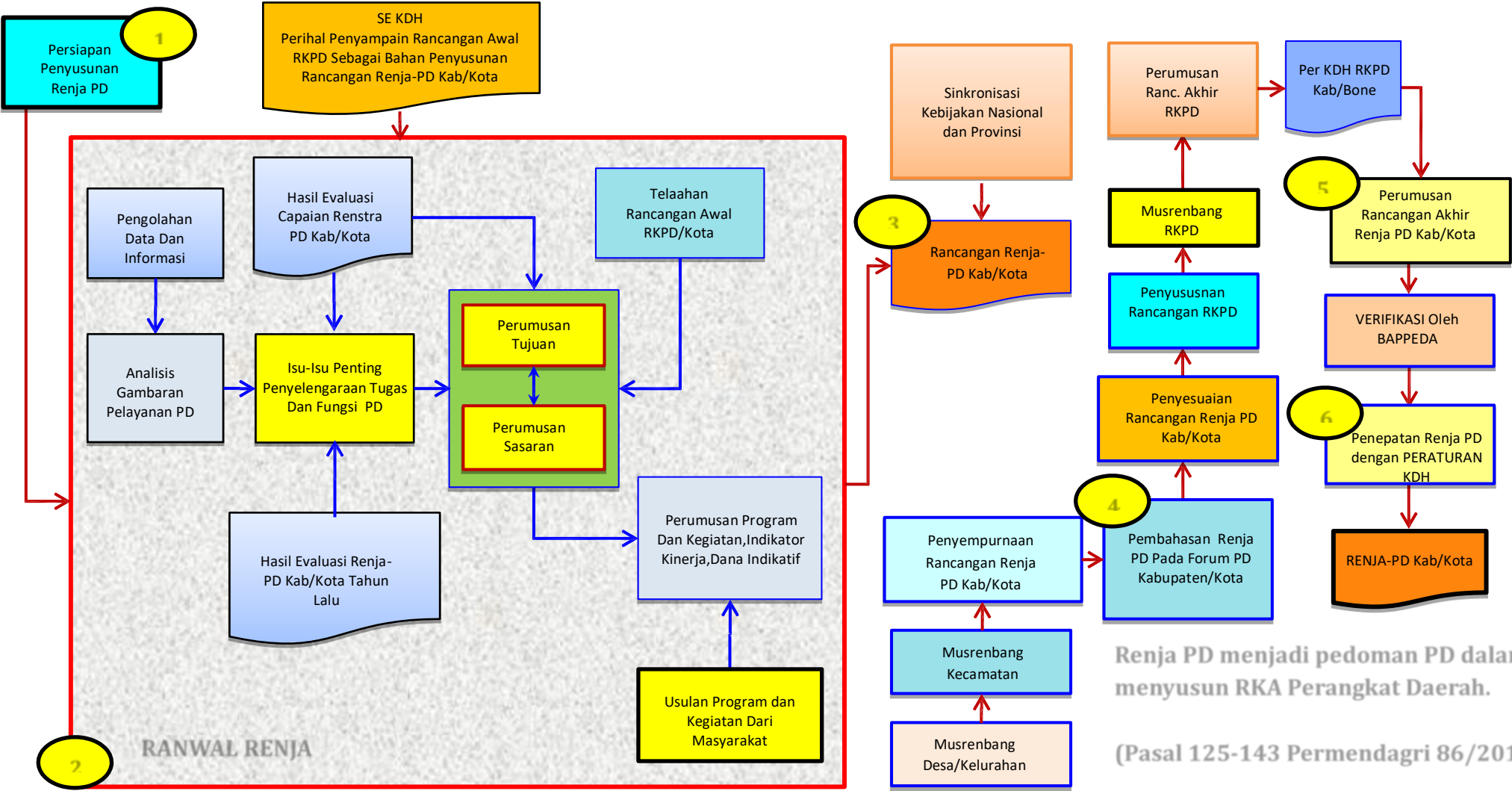
Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja- PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengo Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
 39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
 40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
 41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
 42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengo Tahun 2023 disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bengo Kab.Bone dalam pelaksanaan urusan Kecamatan Bengo
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran RKA/DPA Kantor Camat Bengo pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengo Tahun 2023 ini, adalah :

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Bengo yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Bengo pada tahun 2023 sesuai dengan renstra perubahan tahun 2018-2023

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bengo Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dengan mendorong terwujudnya ttata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bengo Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan : memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu : menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : memuat rumusan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bengo : Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Kecamatan Bengo secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup : Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Kecamatan Bengo pada Tahun perencanaan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BENGU TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontocani Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bengu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bengu

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2023 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Bengu hingga tahun 2021 mengacu pada Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2022 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2021 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2022.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja hingga tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2022, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu

keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Kecamatan Bengo Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2022, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel (T-C.29)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90
 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bengo

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan	
										Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01					KECAMATAN									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 2.Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik.	100	100	100	100	100	100	100	100

7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	5	4	4 Dokumen	4	100 %	4 Dokumen	12	3%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ihktisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	12	12	12 Laporan	12	100 %	12 Laporan	36	3 %
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	0	12 Dokumen	12	100 %	12 Dokumen	12	0 %

7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	36	36	36 Paket	3	100 %	36 Paket	75	2,08 %
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	152	138	125 Paket	125	100 %	152 Paket	415	2,73 %
7	01	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor sesuai rencana(unit)	4	4	2 Unit	2	100 %	4 Unit	10	2,5 %
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	5	4	3 Unit	3	100 %	5 Unit	12	2,5 %
7	01	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100

7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	36	36	36 Rekening	36	100 %	36 Rekening	108	3 %
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	96	96	96 Laporan	96	100 %	96 Laporan	288	3 %
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit)	3	3	3 Unit	3	100 %	3 Unit	9	3 %
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi KegiatanPenunjang Pemerintahan Umum(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase kegiatan koordinasi dan	100	100	100	100	100	100	100	100

						<i>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan (%)</i>								
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan kegiatan musrembang di Kecamatan (Dokumen)	1	1	1 Dokumen	1	100 %	1 Dokumen	3	3 %
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	2	2 Dokumen	2	100 %	2	6	3 %
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Perentase Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah operasional pengawasan Tripika (Orang)	36	36	36 Orang	36	100 %	36 Orang	108	3 %
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Perentase Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)</i>	9	9	9 Laporan	9	100 %	9 Laporan	27	3 %

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Sebagai penjelasan tambahan terkait table tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunya Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, dimulai dari Tahun 2021 sebagai baseline dan evaluasi capaian kinerja 3 tahun selanjutnya. Baseline data yang biasa disajikan hanya terkait dengan indikator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indicator kinerja sesuai Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indikator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2021 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2022.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2022, yang tersaji pada tabel 1 di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 5 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 20 indikator sub kegiatan. Pada 5 program, 12 kegiatan, dan 20 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Bengo Kab. Bone Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan (output), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2022 sebesar%, dengan rincian sebagai berikut :

17 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 70%;

0 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 55- 70%;

0 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 55%;

3 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 12 indikator kinerja kegiatan (initial outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

11 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;

0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;

0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;

1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 5 indikator kinerja program (outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

4 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;

0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;

0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;

1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga triwulan ke-2 tahun 2022, baru mencapai 48,99% secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada. Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.

Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, masih terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2 untuk Renja 2022. Dari 4 indikator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2 tahun 2022 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, karena dipengaruhi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan kurangnya dana atau belum dicairkannya dana Kecamatan pada kegiatan tersebut.
- c. Dampak terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu tidak terealisasinya beberapa program dan kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja belum bisa optimal dan mencapai target.
- d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan agar mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Kerja dan Renstra Perubahan Kecamatan Bengo Kab. Bone), khususnya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :

Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip "money follow program" yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bengo. kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya.

Melakukan Asistensi per kegiatan agar kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengo

Wilayah Kecamatan Bengo terdiri dari 9 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Bengo lebih cepat sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang tercermin dalam program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan - kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

Struktur organisasi Kantor Camat Bontocani Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Situasi kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (Team Work). Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait. Sarana dan prasarana kerja di kantor camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi Kecamatan terkait.

2. Kelemahan - kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya :

Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah/minim. Masih adanya aparatur sipil negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bengo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bengo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Persen (%)	<u>Penjelasan Target:</u> Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil Penilaian SAKIP <u>Sumber Data:</u> LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	Persen (%)	<u>Penjelasan Target:</u> Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik. <u>Sumber Data:</u> LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Tabel III. T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengo
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	1
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	BB	BB	BB	BB	Masih dalam Proses	-	BB	BB	Target sudah terpenuhi ditahun 2021
<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan yang terlaksana pada bulan Februari-Maret 2022, tingkat kuntabilitas kinerja Kecamatan telah mencapai predikat BB. Capaian kinerja indikator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam perubahan Renstra dan perubahan RPJMD Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh Inspektorat dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan serta monev kinerja secara berkala.</p>												
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	B	B	90	95	100	100	100	100	100	100	Target terpenuhi

Catatan Analisi: Hasil evaluasi capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik. Capaian kinerja indikator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar agar target capaian kinerja dapat memenuhi target yang diharapkan.

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bengo

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bengo untuk cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) Pencapaian visi dan misi Kecamatan Bontocani sebagai penjabaran visi misi kabupaten Bone akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan diantaranya yaitu:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Bontocani Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Bengo.

Secara Umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan;
4. Adanya tuntutan Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
6. Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan
7. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus dijaga dan ditingkatkan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam renstra Kecamatan mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Bengo Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kantor Kecamatan Bengo.

Tantangan yang diperkirakan dihadapi Kecamatan Bengo selama 2023 dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Kepentingan

Sebagaimana diketahui dalam menentukan berbagai kebijakan sangat membutuhkan koordinasi yang intensif guna mensinkronkan berbagai kepentingan agar dapat berjalan secara harmonis. Dalam konteks tersebut kantor Kecamatan Bengo selalu berupaya untuk lebih professional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menampung berbagai usulan dari berbagai pihak untuk dirumuskan dan ditindaklanjuti demi mewujudkan kesejahteraan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Pegawai

Kondisi ekonomi pegawai juga ikut turut berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Bengo secara optimal, karena beban dan kebutuhan keluarga

para pegawai yang semakin tinggi sedangkan sumber pendapatan hanya diharapkan dari gaji yang tetap, tentu akan berpengaruh dalam mewujudkan kualitas pelayanan terutama dalam hal disiplin kerja. Mengatasi hal tersebut, kantor Kecamatan Bengo selalu berupaya seoptimal mungkin memotivasi para personil sekaligus menerapkan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah Kab.Bone untuk menambah tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Kecamatan Bengo dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

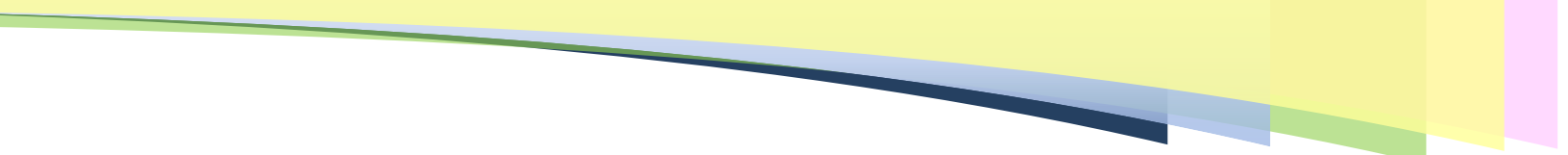
1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan.
4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan pelatihan teknis di bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kab. Bone.

2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengo.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bengo. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.



Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel IV. (T-C.31)
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Bengo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Renstra/Renja					Kepmen 050-5889					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (%) 2. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (%)	100	10.509.377.130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah (%)	100	10.030.745.976	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (%)	100	27.903.743	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(%)	100	41.805.650	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bengo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	4	12.903.743	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bengo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat(Dokumen)	4	26,889,850	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Kegiatan Pameran Pembangunan yang diikuti Perangkat daerah	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	14,915,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	10.981.210.936	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	9.667.834.836	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bengo	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	127	10.981.210.936	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bengo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	127	9,667,834,836	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	18.480.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	16.800.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	9.240.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	8.400.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bengo	<i>Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1	9.240.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	8.400.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)</i>	100	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>	100	9.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bengo	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	20	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Bengo	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	20	9,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (%)</i>	100	177.164.717	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (%)</i>	100	130.808.690	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	21.229.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	14,696,280	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bengo	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	3	55.616.767	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	51,827,410	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	4	5.142.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4,775,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	3	4.356.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bengo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2,520,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	152	90.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	152	56,990,000	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)</i>	100	43.474.123	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>	100	33.326560	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Bengo	Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana(unit)	4	12.045.000	Pengadaan Mebel (Unit)	Kecamatan Bengo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	4	2,194,200	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bengo	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	5	31.429.123	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	Kecamatan Bengo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	31,132,360	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)	100	64.875.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	70.741.448	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bengo	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	36	16.843.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	15,426,248	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bengo	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	96	48.032.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	96	55,315,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan periodic ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah (%)	100	126.532.604	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	60.428.792	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bengo	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	3	126.532.604	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bengo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	60,428,792	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi KegiatanPenunjang Pemerintahan Umum(%)	100	22.486.640	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	16.376.890	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan (%)</i>	100	22.486.640	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)</i>	100	16.376.890	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bengo	Pelaksanaan kegiatan musrembang di Kecamatan (Dokumen)	1	22.486.640	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	16,376,890	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	20.911.099	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (%)	100	15.000.000	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan</i>	100	20.911.099	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)</i>	100	27.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bengo	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	1	20.911.099	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	15,000,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum(%)	100	32.670.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	27,000,000	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100	32.670.000	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100	27,000,000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bengo	<i>Jumlah operasional pengawasan Tripika (Orang)</i>	36	32.670.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	27,000,000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		<i>Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)</i>	100	7.260.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100	6.750.000	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100	7.260.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(%)</i>	100	6.750.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Bengo	<i>Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa</i>	9	7.260.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Bengo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	9	6,750,000	

Sumber Data : Renstra Perubahan dan Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan Bengo dalam hal pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, dan perguruan tinggi.

1. Pengembangan Sanitasi dan Air Minum
2. Pengembangan dan Pengolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan
6. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
7. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Pengelolaan Kekayaan Budaya
10. Pengembangan Perumahan
11. Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
14. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
15. Pembangunan Jalan dan Jembatan
16. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu **”Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan fokus pembangunan diarahkan pada Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 - 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 - 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 - 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2023 : **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05

4. Rasio Gini sebesar 0,381
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 5 (Lima) Program Prioritas yaitu: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”.

Sementara 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bengo

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Bengo Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

“Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)”

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

“Transformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Social Masyarakat ”

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontocani Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2022, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas", menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengo Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bengo Kab. Bone untuk Tahun 2023.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bengo Kab. Bone Tahun 2023, yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Kecamatan Bengo Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bengo

Dengan **Sasaran** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2023, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 – Kecamatan Bontocani Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2024)	TARGET SASARAN TAHUN 2023	PROGRAM & KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	BB (>70-80)	BB (>70-80)	
	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	100%	100%	➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah• Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah• Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p>Terdiri dari 25 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p> <p>➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan <p>Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p> <p>➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum <p>Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 & Renja 2023

3.3 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Permendagri 90

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2023, maka Kecamatan Bengo merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kejadiannya yang tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

☐ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

☐ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

☐ **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

☐ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

☐ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

☐ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

☐ **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

☐ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

☐ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

☐ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

☐ **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

☐ **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BENG

Berdasarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Bengo tahun 2023, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari program dan kegiatan utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama perangkat daerah yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Bengo tahun 2023 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kab. Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN No.90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang disediakan oleh Kepmendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Bengo melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

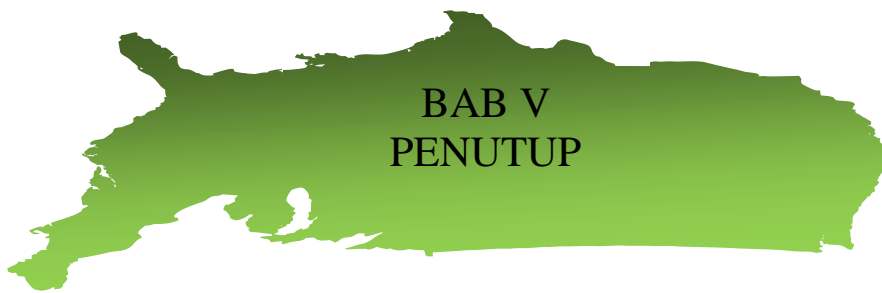
Tabel VI.(T-C.33)
Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan maju Tahun 2024
Kecamatan Bengo berdasarkan kepmen 050/5889
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bengo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								10,095,872,866				11,174,098,762	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,030,745,976				11,083,440,458	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,805,650				46,090,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	26,889,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	29,590,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	14,915,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	16,500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,667,834,836				10,551,887,665	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan periodik ihtisar hasil hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	127 Orang/bulan	100 Persen	9,667,834,836	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,551,887,665
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								16,800,000				18,480,000	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	8,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	9,240,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	8,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	9,240,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								9,000,000				11,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Paket	100 Persen	9,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	11,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130,808,690				188,847,874	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	14,696,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	17,574,524
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 Persen	51,827,410	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	61,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 Persen	4,775,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	5,656,750
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	2,520,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,791,600
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	152 Laporan	100 Persen	56,990,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	99,825,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33,326,560	47,821,535				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	2,194,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	13,249,500
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	100 Persen	31,132,360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	34,572,035
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70,741,448	80,127,520				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	15,426,248	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	18,527,520

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	96 Laporan	100 Persen	55,315,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	61,600,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,428,792	139,185,864				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 Persen	60,428,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	139,185,864
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								16,376,890	24,735,304				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								16,376,890	24,735,304				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang Diikuti dan Dilaksanakan	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	16,376,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	24,735,304
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								15,000,000	22,000,000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,000	22,000,000				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	22,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								27,000,000	35,937,000				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								27,000,000	35,937,000				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	35,937,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								6,750,000	7,986,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								6,750,000	7,986,000				
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Laporan Hasil Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Bengo, Semua Kelurahan	100 Persen	9 Laporan	100 Persen	6,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa	100 Persen	7,986,000
TOTAL													10,095,872,866	11,174,098,762				



BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Kecamatan Bengo adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Bengo akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Bengo Tahun 2023 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan Tupoksi Kecamatan akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2023 khususnya dalam mewujudkan **"Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"**.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

- a. Sinergi Regulasi ; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor

RPJMN Tahun 2018-2023. selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

b. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2019 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJPD kabupaten Bone Tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 . Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang) disemua tingkatan pemerintah (Desa/Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari D e s a /kelurahan dan serta usulan dari Kecamatan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Kecamatan Bengo Sebagai berikut :

1. Program Pendukung/Penunjang

- a. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
- b. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- c. Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Penunjang Pendampingan ADD;
- f. Penujang pelaksanaan STBM Tingkat Desa dan Kelurahan

2. Program Utama

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bone tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Kecamatan, Maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Kecamatan Bengo mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Kecamatan sebagai pelaksana dalam hal pembangunan infrastruktur Kecamatan Bengo membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga pencapaian kinerja kegiatan yang membutuhkan sumber daya maksimal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. Menerapkan system *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan kecamatan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan kecamatan terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menetapkan dokumen perencanaan Kecamatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.

Matango, 29 Juli 2022

Camat Bengo


RAHMATULLAH, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197909061999121001

LAMPIRAN 1

CASCADING KINERJA RENJA KECAMATAN BENGOLAB. BONE

TAHUN 2023

CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2023 – KECAMATAN BENGU

VISI – RPJMD KAB. BONE 2018 –2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSsa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)
MISI – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
TUJUAN & SASARAN – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023	Tujuan: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bengo
	Indikator Kinerja: Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Indikator Kinerja: Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)

PENANGGUNG JAWAB	CAMAT BENGU
-------------------------	--------------------

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN	CAKUPAN PENINGKATAN PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN DANA DESA
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 10.030.745.976	16.376.890	Rp.15.000.000	Rp. 27.000.000	Rp. 6.750.000
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SEKSI TRANTIBUM	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Koordinasi peyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Priodik Ihktisar hasil-hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan Priodik hasil ihtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkar daerah	Persentase Laporan Priodik Ikhtisar Hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase laporan priodik ihtisar hasil pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase laporan priodik ihtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	Persentase Laporan Priodik Ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan Hasil realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Target Kinerja:100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100 %	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 41.805.650	Rp. 9.667.834.836	Rp. 16.800.000	Rp. 9.000.000	Rp.130.808.690	Rp. 33.326.560	Rp.70.741.448	Rp. 60.428.792	Rp. 16.376.890	Rp. 15.000.000	Rp. 27.000.000	Rp. 6.750.000
UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PEMBANGUN AN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI PEMBANGU NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI TRANTIBUM	SEKSI PEMBANGUNA N, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintaha di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikel diwilayah Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping an Desa di Wilayahnya
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja:	Target Kinerja:	Target Kinerja:

ANGGARAN	Rp. 26.889.850	Rp. 9.667.834.836	Rp. 8.400.000	Rp. 9.000.000	Rp. 14.696.280	Rp. 2.194.200	Rp. 15.426.248	Rp. 60.428.792	Rp. 16.376.890	Rp. 15.000.000	Rp. 27.000.000	Rp.6.750.000
SUB KEGIATAN 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja dan skpd		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor					
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi dan kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah Pada SKPD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
	Target Kinerja: 100%		Target Kinerja: 100%		Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%					
ANGGARAN	Rp. 14.915.800		Rp. 8.400.000		Rp. 51.827.410	Rp. 31.132.360	Rp. 55.315.200					
SUB KEGIATAN 3					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan							
					Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN					Rp. 4.775.000							
SUB KEGIATAN 4					Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan							

					Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN					Rp. 2.520.000							
SUB KEGIATAN 5					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN					Rp.56.990.000							
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI PEMBANGUNA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI TRANTIBUM